



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA MADIUN
UNIT KERJA : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUDANDI**
2. Jabatan : **KEPALA BADAN**
3. NHK : **154285**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 1.640.551.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m2/75 m2 di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
2. Tanah Seluas 479 m2 di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 171.801.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 568 m2/212 m2 di KAB / KOTA MADIUN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 450.000.000
4. Tanah Seluas 136 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 81.000.000
5. Tanah Seluas 3120 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 285 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 242.250.000
7. Tanah Seluas 135 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 175.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 345.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA XMAX SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
2. MOTOR, KAWASAKI NINJA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
3. MOBIL, TOYOTA YARIS 1,5 S CVT/ MINIBUS Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. 89.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	26.121.725
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.100.672.725
III. HUTANG	Rp.	241.041.880
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.859.630.845

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.